



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**TAHUN 2019**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	91,54	94,98	103,75
2	Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah	Rp	425.381.500.000	451.265.948.031	106,08

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan melebihi target yang telah ditetapkan.

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja instansi harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Badan pengelolaan Keuangan telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2019.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Januari 2020

Kepala



## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.4 Isu Strategis .....	4
1.5 Keadaan Pegawai .....	6
1.6 Sarana dan Prasarana .....	7
1.7 Keuangan .....	8
1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
2.1 Perencanaan Strategis .....	10
2.1.1. Tujuan Strategis .....	13
2.1.2. Sasaran Strategis .....	14
2.1.3. Indikator Sasaran Strategis .....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	16
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019 .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis. ....	23
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.. ....	24
3.4 Realisasi Anggaran .....	28
3.5 Inovasi .....	35
BAB IV PENUTUP .....	36
4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	37

## LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)
3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya
5. Pengukuran kinerja TW IV tahun 2019
6. Rencana Aksi
7. Penghargaan yang pernah diterima

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja (LKj) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

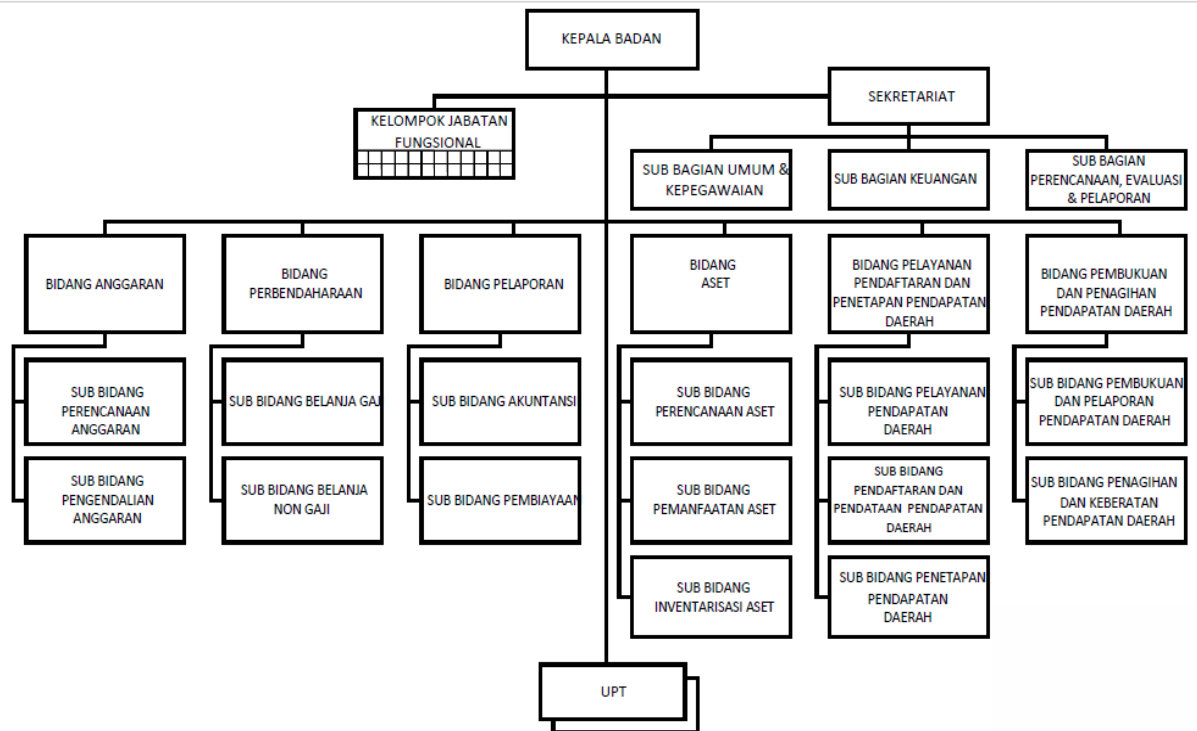
## **1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, Susunan Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Anggaran terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
  2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Belanja Gaji
  2. Sub Bidang Belanja Non Gaji
- e. Bidang Pelaporan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Akuntansi
  2. Sub Bidang Pembiayaan
- f. Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
  2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah
  3. Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah
- g. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah
- h. Bidang Aset
  1. Sub Bidang Perencanaan Aset
  2. Sub Bidang Pemanfaatan Aset
  3. Sub Bidang Inventarisasi Aset

Adapun Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi**



### 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.



Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta merupakan bentuk tanggungjawab secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan menjadi alat evaluasi dalam pencapaian sasaran program dan output kegiatan.

#### **1.4 ISU STRATEGIS**

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai Good dan Clean Governance.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan ketugasan adalah :

1. Kepatuhan anggaran OPD.

2. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.
3. Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD masih perlu ditingkatkan.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
5. Data Wajib Pajak Daerah belum selalu update dan status Obyek Pajak sering berubah.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
7. Penagihan piutang pajak perlu ditingkatkan.
8. Perlu adanya evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
9. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
10. Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan.
11. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing OPD.
12. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif.
2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai standar akuntansi Pemerintah dan tepat waktu;
3. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pada BLUD.
4. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap pengelolaan barang milik daerah.

5. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan obyek pajak.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak.
7. Melakukan pemeriksaan, dan akan melakukan penagihan pajak PBB dengan pekan pembayaran PBB.
8. Melaksanakan evaluasi transaksi non tunai.
9. Meningkatkan dan mengevaluasi SPIP.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta akan lebih berperan sebagai mitra kerja dan pendamping OPD maupun mitra kerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## 1.5 KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Pangkat dan Golongan Pegawai**

JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Kepala	Pembina Utama	IV/c	1 orang
Sekretaris	Pembina TK I	IV/b	1 orang
KepalaBidang	Pembina TK I	IV/b	1 orang
	Pembina	IV/a	4 orang
	Penata TK I	III/d	1 orang
KepalaSub.B ag/Sub.Bid.	Pembina	IV/a	2 orang
	Penata TK I	III/d	10 orang
	Penata	III/c	2 orang
JabatanFung sionalUmum	Ahli Muda/Penata Tk I	III/d	1 orang
	TerampilPelaksana/Pengat ur TK I	II/d	1 orang

<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Staf	Penata TK I	III/d	3 orang
	Penata	III/c	20 orang
	Penata Muda TK I	III/b	33 orang
	Penata Muda	III/a	20 orang
	Pengatur TK I	II/d	10 orang
	Pengatur	II/c	1 orang
	Pengatur Muda TK I	II/b	1 orang

*Sumber data: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2019*

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Pendidikan Pegawai**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JMLAH</b>
Master/S2	14 orang
Sarjana/S1	48 orang
Diploma/D3	17 orang
SLTA/ sederajat	37 orang
SLTP	2 orang

*Sumber data: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2019*

## **1.6 SARANA DAN PRASARANA**

Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mendukung adalah:

**Tabel 1.3**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung**

<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
Kendaraan roda empat	9	buah	Baik
Kendaraan roda dua	53	buah	Baik
Sepeda	1	buah	Baik
Ruang rapat	3	buah	Baik
Laboratorium SIPKD	3	buah	Baik
Mesin ketik	5	buah	Baik
PC Unit	91	buah	Baik
PC Server	1	buah	Baik
UPS	160	buah	Baik
Printer	203	buah	Baik
Laptop	6	buah	Baik

<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
LCD Proyektor	12	buah	Baik
Komputer	44	buah	Baik
Telepon	14	buah	Baik
Mesin Fax	1	buah	Baik
Rak Besi	34	buah	Baik
Rak Kayu	29	buah	Baik
Kamera Foto Digital	8	buah	Baik
Wireless Mic.	3	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	2	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	76	buah	Baik
Meja Tulis	16	buah	Baik
Meja ½ biro	188	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	9	buah	Baik
Meja Ketik	23	buah	Baik
Kursi Putar	74	buah	Baik
Kursi Besi	45	buah	Baik
Kursi kayu	37	buah	Baik
Kursi Lipat	228	buah	Baik
Almari besi	6	buah	Baik
Almari Kayu	2	buah	Baik
Almari Kaca	9	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
Radio Cassette Rec.	1	buah	Baik

*Sumber data: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian , Des 2019*

## **1.7 KEUANGAN**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 BPKAD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp52.247.296.207,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp26.915.602.207,- dan belanja langsung sebesar Rp25.331.694.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-

program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp25.331.694.000,- yang didukung oleh 10 program dan 20 kegiatan seperti dijelaskan di bab 2 poin 7.

### **1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kota Yogyakarta tahun 2019 disusun sebagai berikut :

1. BAB IPENDAHULUAN
2. BAB IIPERENCANAAN KINERJA
3. BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
4. BAB IVPENUTUP
5. LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2017 – 2022 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Walikota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurussendiriurusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

**“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat Moral, Etika dan budaya Masyarakat Kota Yogyakarta

4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan , kesehatan, sosialbudaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarianlingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelolapemerintahan yang baik dan bersih

Berkaitan dengan Misi dan program kerja Walikota tahun 2017 – 2022, untuk lima tahun ke depan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Walikota ke 7(tujuh) **“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih” dan mendukung sasaran no 13 yaitu Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.**

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota.

Program adalah Rencana Strategis 5(lima) tahunan yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;



3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 -2022 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target**

Tujuan :	1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah			
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Program</b>
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	91,54	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	1. Perencanaan dan pengendalian Anggaran 2. Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan dana Transfer 3. Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

				4. Perencanaan, Pemanfaatan Dan Inventarisasi Aset
Pendapatan pajak daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah	425.381.500.000	Pendapatan pajak daerah meningkat	1. Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 2. Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah

Cara pengukuran :

Pengukuran untuk tujuan strategis dihitung dengan 25% kinerja program perencanaan dan pengendalian + 25% kinerja program pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Sedangkan untuk peningkatan pajak daerah diukur dari Nilai Pajak Daerah.

### 2.1.1 Tujuan Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu Tahun 2017–2022 yakni meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta akan lebih baik apabila mengetahui sumberdaya yang ada dan kemampuan yang dimiliki BPKAD Kota Yogyakarta, untuk mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang sesuai dengan Misi Walikota yaitu Misi ke 7 (tujuh) **“Meningkatkan tata kelolapemerintah yang baik dan bersih”**.

### 2.1.2 Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat;
2. Pendapatan Pajak daerah meningkat.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis BPKAD Kota Yogyakarta**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	89,37	90,44	91,54%	92,63%	93,72 %	94,81 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pendapatan Pajak daerahmenin gkat	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	59%	59%	-	-	-	-
		Nilai Pajak Daerah	Rp	-	-	425.381.500.000	451.106.500.000	471.206.500.000	482.986.500.000

### 2.1.3 Indikator Sasaran Strategis

Bahwa setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (Sasaran Indikator) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Yogyakarta adalah :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Nilai Pajak Daerah.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Sasaran Strategis BPKAD Kota Yogyakarta**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Indekspengelolaankeua ngan dan asetdaerah	Perencanaan dan PengendalianAngg aran	1. PerencanaanAnggaran 2. PengendalianAnggaran
		Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan dana Transfer	1. PengendalianBelanja Daerah 2. Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
		Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggung-jawaban	1. PenyusunanPertanggungjawabanPela ksanaan APBD 2. PengelolaanPembiayaan dan Pembinaan Pola PengelolaanKeuangan BLUD
		Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	1. Perencanaan,Pengadaan dan DistribusiAset 2. Pemanfaatan dan OptimalisasiAset 3. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
	Nilai Pajak Daerah	Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	1. Pelayanan Pajak Daerah 2. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 3. Penetapan pajak Daerah 4.
		Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	1. Pengelolaan Penagihan, Keberatan, dan Pembinaan Pajak Daerah 2. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

Cara pengukuran indikator kinerja utama dengan fomula indikator tujuan dihitung dengan presentase kinerja suatu perangkat daerah.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indekspengelolaankeuangan dan asetdaerah	91,54
2.	PendapatanPajak Daerah meningkat	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	64,94%

Pada tahun 2019, BPKAD melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan indikator kinerja pada sasaran Pendapatan Pajak daerah meningkat. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.5**

Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2019

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indekspengelolaankeuangan dan asetdaerah	91,54
2.	PendapatanPajak Daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah	425.381.500.000

## Program

1. Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Rp.	137.724.493,-
2. Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan dana Transfer	Rp.	56.716.000,-
3. Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp.	857.996.000,-
4. Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Rp.	707.732.489,-
5. Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	Rp.	2.181.306.000,-
6. Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Rp.	13.622.184.818,-

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

### **2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019**

Rencana Kinerja Tahun 2019 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang terpilih yaitu :  
**“Meningkatkan tata kelolapemerintah yang baik dan bersih”.**

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indicator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

**Tabel 2.5**

**Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2019**

Uraian	Target	Prosentase
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Rp26.915.602.207,-	51,52%
<b>Belanja Langsung</b>	Rp25.331.694.000,-	48,48%
<b>Jumlah</b>	Rp52.247.296.207,-	100%

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 BPKAD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	14.674.621.311	57,93%	Total belanja langsung sebesar Rp25.331.694.000,-
2.	Pendapatan Pajak Daerah meningkat	2.889.038.489	11,40%	

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya



mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan asset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menampung 10 (sepuluh) program dan 20 (dua puluh kegiatan), dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2019**

No.	Nama Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Ket.
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	175.525.000,-	
		2. Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	7.094.805.931,-	
II	Peningkatan Sarana dan Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	159.000.000,-	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	256.878.269,-	
III	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	69.000.000,-	
IV	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja	12.825.000,-	
V	Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Perencanaan Anggaran	109.274.493,-	
		Pengendalian Anggaran	28.450.000,-	
VI	Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan dana Transfer	1. Pengendalian Belanja Daerah	44.407.000,-	
		2. Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	12.309.000,-	
VII	Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	322.324.000,-	
		Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	535.672.000,-	

<b>No.</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Ket.</b>
VIII	Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	1. Pelayanan Pajak Daerah	287.869.796,-	
		2. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	137.345.000,-	
		3. Penetapan Pajak Daerah	282.517.693,-	
IX	Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	1. Pengelolaan Penagihan, Keberatan, dan Pembinaan Pajak Daerah	334.650.000,-	
		2. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	1.846.656.000,-	
X	Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	1. Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	10.714.911.500,-	
		2. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	2.523.015.493,-	
		3. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	384.257.825,-	

Berdasarkan tabel di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2019 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2019.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	91,54	94,98	103,75

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah	Rp	425.381.500.000	451.265.948.031	106,08

Dari tabel di atas, terdapat dua sasaran yang terbagi dalam dua indikator. Pada tahun 2019, Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 94,98 % dari target sebesar 91,54% atau sebesar 103,75% dari target. Sementara itu, Nilai Pajak Daerah juga telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,08%. Jadi kedua indikator diatas semuanya memenuhi target. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama yang erat semua bidang di BPKAD Kota Yogyakarta.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam dua indikator kinerja, yaitu **akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset meningkat serta peningkatan pajak daerah**. Indikator sesuai kriteria spesifik, dapat dinilai, dan diukur, berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis yang telah dicapai yaitu :

1. Optimalisasi pajak daerah dengan indikator realisasi pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp 451.265.948.031,- dari target pajak daerah sebesar Rp 425.381.500.000,- yaitu sebesar 106,08%.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah, dengan indikator sasaran Penilaian audit eksternal dengan target

renstra adalah Wajar dan capaian kinerjanya Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dan telah meraih WTP ke 10(sepuluh).

3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, dengan target 94,00 % telah terealisasi sebesar 96,95 %.

**Tabel 3.2**

**Realisasi Pajak Daerah**

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	152.000.000.000	161.297.192.790	106,12
2.	Pajak Restoran	53.000.000.000	63.237.228.654	119,32
3.	Pajak Hiburan	12.500.000.000	12.702.230.080	101,62
4.	Pajak Reklame	7.200.000.000	7.449.951.971	103,47
5.	Pajak Penerangan Jalan	51.000.000.000	52.374.696.494	102,70
6.	Pajak Parkir	3.675.000.000	3.050.479.181	83,01
7.	Pajak Air Tanah	2.500.000.000	2.546.299.969	101,85
8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000	6.650.000	102,31
9.	Pajak Bumi & Bangunan	82.500.000.000	86.550.328.189	104,91
10.	BPHTB	61.000.000.000	62.050.890.703	101,72
	JUMLAH	425.381.500.000	451.265.948.031	106,08

### 3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD.

Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga menjalankan ketugasan dalam pelayanan dibidang pajak daerah yang tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran,penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing.Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah. Indikator

Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempertimbangkan objektifitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Yogyakarta**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULA INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan keuangan dan aset daerah Target : 89,37%	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	1. Perencanaan dan Pengendalian anggaran	100,00%	100,00%	100,00%
		Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	2. Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	92,60%	89,79%	96,97%
		Jumlah OPD dengan Laporan Keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	3. Pengelolaan Pembiayaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	79,54%	93,18%	117,15%
		Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%	4. Perencanaan, pemanfaatan dan inventarisai aset	94,00%	96,95%	103,14%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah		1. Pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah	425.381. 500.000	451.265. 948.031	106,08%
			2. Pembukuan dan penagihan pajak daerah	14,5%	23,71%	163,52%

Dalam mengukur capaian indikator “Indeks Pengelolaan keuangan dan aset daerah” Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 didasarkan pada :

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%, penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja, seperti tersebut pada Formula indikator program adalah :

**Capaian indikator Kinerja = Realisasi : target x 100%**

3. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran kinerja, bahwa kinerja masing-masing program untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan bobot 100 % dari nilai masing-masing program pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu dengan formula indikator sebagai berikut :

25% dari kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran kali + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset daerah. Indikator sasaran pada pendapatan pajak daerah meningkat diukur dari Jumlah Pajak Daerah di tahun 2019. Dari Capaian

Kinerja tersebut diatas maka capaian dapat dihitung sebagai berikut :

- Program Perencanaan dan Pengendalian anggaran :  
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$
- Program Pengendalian belanja daerah dan Pengelolaan dana stransfer :  
 $25\% \times 89,79\% = 22,45\%$
- Program Pengelolaan Pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD :  
 $25\% \times 93,18\% = 23,30\%$
- Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset :  
 $25\% \times 96,95\% = 24,24\%$

Maka Capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran pada IKU "indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah" telah mencapai sebesar  $25\% + 22,45\% + 23,30\% + 24,24\% = \mathbf{94,98\%}$

4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skalapengukuran sebagai berikut dengan asumsi bahwa :

- |           |                  |
|-----------|------------------|
| 85 s/ 100 | : sangatberhasil |
| 70 s/d 85 | : Berhasil       |
| 55 s/d 70 | : Cukupberhasil  |
| 0 s/d 55  | : Kurangberhasil |

Dengan Nilai sebesar 94,98 % Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta memiliki predikat "**sangat berhasil**". Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis kinerja untuk pencapaian kinerja yang memberikan informasi lebih transparan dalam capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Dalam mengukur capaian indikator "Nilai Pajak Daerah" maka Capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran pada IKU " Nilai Pajak Daerah". Target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp



425.381.500.000 dengan realisasi Rp451.265.948.031 yaitu 106,08%.

Pendapatan pajak daerah terdiri dari :

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak parkir
- Pajak air tanah
- Pajak sarang burung walet
- Pajak bumi dan bangunan
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Atas capaian tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian nilai pajak daerah oleh BPKAD berhasil.

### **3.4 REALISASI ANGGARAN**

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta telah mencapai nilai melebihi target yang di tentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja.

Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja BPKAD Kota Yogyakarta dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada

Tabel 3.3 diatas, maka untuk target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Anggaran**

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsolidasi	175.525.000,00	175.433.028,00	99,95%
		2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan kantor	7.094.805.931,00	6.576.688.248,52	92,70%
2.	Program Peningkatan Sarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	159.000.000,00	154.858.000,00	97,39%
		2. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	256.878.269,00	200.612.187,16	78,10%
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	69.000.000,00	60.000.000,00	86,96%
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja	12.825.000,00	12.816.950,00	99,94%
5.	Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	1. Perencanaan Anggaran	109.274.493,00	106.710.992,16	97,65%
		2. Pengendalian Anggaran	28.450.000,00	27.137.200,00	95,39%
6.	Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan dana Transfer	1. Pengendalian Belanja Daerah	44.407.000,00	42.001.400,00	94,58%
		2. Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	12.309.000,00	11.756.000,00	95,51%
		3.			

<b>No</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
7.	Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban	1. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	322.324.000,00	298.250.516,00	92,53%
		2. Pengelolaan Pembinaan dan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	535.672.000,00	480.331.000,00	89,67%
8.	Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	1. Pelayanan Pajak Daerah	287.869.796,00	287.865.295,00	100%
		2. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	137.345.000,00	135.187.931,00	98,43%
		3. Penetapan Pajak Daerah	282.517.693,00	282.514.692,16	100%
9.	Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	1. Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	334.650.000,00	328.401.000,00	98,13%
		2. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	1.846.656.000,00	1.809.240.000,00	97,97%
10.	Peningkatan dan Pengelolaan Barang Daerah	1. Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	10.714.911.500,00	10.376.192.162,40	96,84%
		2. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	2.523.015.493,00	2.217.637.905,31	87,90%
		3. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	384.257.825,00	131.706.692,16	34,28%
	<b>JUMLAH</b>		<b>25.331.694.000,00</b>	<b>23.715.341.199,87</b>	<b>93,62%</b>

Perbandingan dengan realisasi tahun lalu ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

### Perbandingan Persentase Realisasi tahun 2018 dan tahun 2019

No	Kegiatan	2018	2019
1.	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsolidasi	99,67 %	99,95%
2.	Penyediaan Jasa,Peralatan dan perlengkapan kantor	93,90%	92,70%
3.	Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan perkantoran	99,76%	-
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	98,46%	97,39%
5.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	66,70%	78,10%
6.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	97,44%	86,96%
7.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja	98,59%	99,94%
8.	Perencanaan Anggaran	97,09%	97,65%
9.	Pengendalian Anggaran	99,98%	95,39%
10.	Pengendalian Belanja Daerah	98,74%	94,58%
11.	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	98,63%	95,51%
12.	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	98,76%	92,53%
13.	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	99,11%	89,67%
14.	Pelayanan Pajak daerah	100,00%	100%
15.	Pendaftaran dan Pendataan Pajak daerah	99,96%	98,43%
16.	Penetapan Pajak Daerah	99,94%	100%
17.	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan pembinaan Pajak Daerah	99,53%	98,13%
18.	Perencanaan, Pengadaan dan distribusi Aset	94,85%	94,85%
19.	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	91,34%	91,34%
20.	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	74.01%	74.01%

**Tabel 3.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah	91,54	94,98	103,75	14.674.621.311	13.691.723.868,03	93,30%
2	Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah	425.381.500.000	451.265.948.031	106,08	2.889.038.489	2.843.208.918,16	98,41%
<b>Jumlah</b>						17.563.659.800	16.534.932.786,19	94,14%
<b>Total BelanjaLangsung</b>						25.331.694.000	23.715.341.199,87	93,62%

Analisis Akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yogyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, asset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pengelolaan pajak daerah yang meliputi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

Capaian kinerja organisasi secara umum sebesar sangat besar dengan rincian 21 kegiatan dengan lima kegiatan yang capaiannya kurang dari 90%.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang

pengelolaan keuangan dan asset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skala pengukuran ordinal rata-rata capaian indikator output adalah **93,62%** dari target 100% masuk katagori "**sangat berhasil**".
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta telah melampaui target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dan asset daerah dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah secara intensif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp26.915.602.207 realisasi Rp 25.141.962.230 atau 93,41%. Pencapaian realisasi cukup tinggi dikarenakan Belanja Tidak langsung meliputi Belanja Gaji PNSD yang merupakan belanja wajib dan mengikat.

Anggaran Belanja langsung sebesar Rp 25.331.694.000,- terealisasi Rp 23.715.341.199,87 atau 93,62%. Pencapaian realisasi

cukup tinggi disertai dengan pencapaian output dan target output kegiatan sesuai yang ditargetkan.

Adapun dari anggaran Belanja Langsung per sasaran program dilihat dari serapan anggaran untuk:

1. Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.674.621.311 realisasi Rp13.691.723.868,03 atau 93,30%. Pencapaian realisasi kinerja sebesar 103,75%.
2. Pendapatan Pajak daerah sebesar Rp 2.889.038.489 dengan realisasi Rp2.843.208.918,16 atau sebesar 98,41% dengan realisasi kinerja sebesar 106,08%.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa BPKAD berhasil melaksanakan tugas pencapaian sasaran kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

**Tabel 3.5**  
**Analisis efisiensi**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah	104,16%	103,75%	0,41%
2	Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah	106,08%	98,41	7,67%

Dari dua Sasaran strategis, terdapat dua sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat Telah mencapai kinerja sebesar 104,16% dengan efisiensi anggaran 0,41%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan untuk semua program
2. Sasaran Pendapatan Pajak Daerah meningkat Telah mencapai kinerja sebesar 106,08.% dengan efisiensi anggaran 7,67%. Efisiensi anggaran

untuk mencapai sasaran diperoleh melalui adanya upaya intensif seperti optimalisasi teknologi, melaksanakan pekan pembayaran serta Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online.

### **3.5 INOVASI**

BPKAD Kota Yogyakarta meluncurkan inovasi dalam rangka melaksanakan amanat perubahan di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain :

#### **1. Pelaksanaan e-SPTPD**

Pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak saat ini bias dilakukan secara online sehingga memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya. Pelaksanaan ini berlandaskan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### **2. Monitoring wajib pajak secara online**

Monitoring wajib ini menggunakan cara *transaction monitoring system*, sehingga dengan metode ini transaksi wajib pajak bias terpantau secara langsung dari kantor BPKAD. Landasan pelaksanaannya adalah terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 tentang Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online.

#### **3. Inovasi percepatan pelaporan aset, dengan rekonsiliasi persediaan dan Aset bulanan.**

Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Persediaan menjadi syarat pencairan SPP LS, TU, dan GU sehingga SKPD harus menyelesaikan pencatatan aset dan persediaan secara benar untuk dapat mencairkan dana. Pelaksanaan system ini diatur dengan Perwal Nomor 58 tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan baik Belanja Tidak Langsung Langsung maupun Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BPKAD sudah berhasil melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dengan nilai sebesar 106,08%
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10 (sepuluh).
3. Berhasil melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga telah terealisasi sebesar 96,95%.
4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan (non strategis) telah mencapai 94,98% dengan kategori sangat baik.
5. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 93,62% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dilihat dari nilai capaian di atas sehingga termasuk dalam kategori berhasil.

#### **4.2 RENCANA TINDAK LANJUT**

Perencanaan tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta akan mereviu Rencana Kerja tahun 2020 untuk :

1. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transferyang dinilai dengan caramencari persentase dari realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah. Hasil dari output ini sudah selama dua tahun berturut-turut lebih rendah dari target.
2. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dinilai dengan cara mencari persentase dari jumlah OPD dengan Laporan Keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD. Hasil dari output ini sudah selama tiga tahun berturut-turut jauh lebih tinggi dari target.

Akhir kata Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban berdasarkan atas rencana strategis Perangkat Daerah.